

Dampak Pemekaran Kabupaten Padang Lawas Terhadap Perekonomian, Sosial dan Infrastruktur di Kabupaten Padang Lawas

The Impact of Expansion of Padang Lawas Regency on The Economy, Social and Infrastructure in Padang Lawas Regency

Siti Sarah Daulay^a, Sirojuzilam^b

^{a,b} Universitas Sumatera Utara

✉ ssarahdaulay@gmail.com · sirohasyim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini secara empiris bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran di kabupaten Padang Lawas terhadap sosial, ekonomi dan infrastruktur. Penelitian ini pada awalnya dilatarbelakangi karena adanya pembentukan daerah otonom baru yaitu Tapanuli Selatan sebagai daerah induk kemudian dipecah menjadi Padang Lawas, sehingga pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan alat analisis adalah analisis deskriptif dan analisis uji beda t-test. Kedua alat analisis ini untuk membandingkan sebelum pemekaran 2002-2007 di Tapanuli Selatan dengan setelah pemekaran 2008-2013 di Padang Lawas. Dari hasil analisis deskriptif terlihat bahwa aspek ekonomi (pendapatan, tenaga kerja dan pertumbuhan industri besar dan sedang), sosial (banyaknya sekolah dan jumlah pusat kesehatan), infrastruktur (panjang jalan dan daya terpasang listrik) sebelum pemekaran 2002-2007 lebih tinggi dari pada setelah pemekaran 2008-2013, kecuali pada aspek ekonomi (PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku) memiliki jumlah yang lebih tinggi setelah pemekaran tahun 2008-2013 dibandingkan dengan sebelum pemekaran tahun 2002-2007. Dari hasil uji beda t-test dengan menggunakan SPSS 22 for windows dari aspek ekonomi (pendapatan, tenaga kerja dan pertumbuhan industri besar dan sedang), sosial (banyaknya sekolah dan jumlah pusat kesehatan), infrastruktur (panjang jalan dan daya terpasang listrik) bahwa ada perbedaan secara signifikan antara sebelum pemekaran tahun 2002-2007 dengan setelah pemekaran tahun 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Kata Kunci: Pemekaran; Sosial; Ekonomi; Infrastruktur

Abstract

This research is empirically aimed at analyzing the social, economic and infrastructure impacts of employment in Padang Lawas district. The background of this research was the formation of a new autonomous region, namely South Tapanuli as the main area, which was then split into Padang Lawas, so that this study used secondary data types with analytical tools, namely descriptive analysis and t-test different test analysis. These two analytical tools were used to compare before division 2002-2007 in South Tapanuli with after the expansion of 2008-2013 in Padang Lawas. From the results of the descriptive analysis it appears that the economic aspects (income, workforce and growth of large and medium industries), social (number of schools and number of health centers), infrastructure (long roads and installed power) before the 2002-2007 division was higher than after the 2008-2013 expansion, except for the economic aspect (PDRB per capita based on current prices) it had a higher amount after the 2008-2013 division than before the 2002-2007 expansion 2007. From the results of the t-test different from me using SPSS 22 for windows from the economic aspect (income, workforce and growth of large and medium industries), social (number of schools and number of health centers),

infrastructure (road length and electricity installed) that there is a significant difference between before division in 2002-2007 with after the division in 2008-2013 with a confidence level of 95%.

Keywords: Expansion; Social; Economy; Infrastructure

1. Pendahuluan

Pembentukan daerah otonom baru (DOB) telah diperjuangkan sejak 1992 hingga 2007, merupakan keberhasilan tersendiri bagi seluruh masyarakat dan tim pemekaran pada khususnya. Karena itu untuk mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah sebagai pelayan dan pengemban tugas masyarakat. Sebagaimana data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perkembangan jumlah daerah otonom di Indonesia antara tahun 1999-2013 telah terbentuk 217 daerah otonom baru yang terdiri 8 Provinsi, 175 Kabupaten, dan 34 Kota. Sehingga, total daerah otonom saat ini 535 yang terdiri dari 34 Provinsi dan 501 Kabupaten dan Kota.

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Lembaga Administrasi Negara dalam [1] menyatakan suatu wilayah dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari pembentukan wilayah itu sendiri.

Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten/kota yang baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru ini akan mempengaruhi aktivitas seseorang atau masyarakat sehingga merasa diuntungkan karena pelayanannya yang lebih maksimal.

2. Landasan Teoritis

Kementrian Dalam Negeri menyatakan [2] dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pembagian wilayah harus sejalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1999 bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Menurut J. Kaloh dalam [3] pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 1999 tersebut seharusnya berbunyi; dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk didaerah provinsi dan di wilayah daerah provinsi dibentuk daerah kabupaten dan daerah kota.

Pemekaran wilayah menurut Arif dalam Ratnawati [4], merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian wilayah sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah.

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri [5]. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 pada Pasal 33 ayat (1) huruf a menyatakan pemekaran daerah berupa pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Pamudji dalam [6] mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.

Pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang

bersangkutan jika ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur dalam penyelenggaraan otonomi luas [7]. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan kemampuan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan perspektif hubungan struktur kelembagaan pemerintahan, implikasi politik dari kewenangan urusan pemerintahan adalah adanya divergensi atau pembagian urusan, yang kemudian urusan yang dibagi ini menjadi kewenangan dari setiap struktur pemerintahan. Filosofi yang mendasari diperlukan adanya pembagian atau pemecaran urusan pemerintahan adalah karena wilayah negara terlalu luas untuk diurus oleh Pemerintah Pusat saja. Oleh karena itu, diperlukan desentralisasi dengan pembentukan daerah otonom dan pembagian urusan.

3. Teknik Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Data deskriptif yang termasuk dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan berdasarkan angka-angka. Untuk data deskriptif ini adapun data-data yang saling berkesinambungan dengan uji komperatif untuk metode analisis adalah mean dan standar deviasi yang diolah dengan menggunakan SPSS 22. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, dokumentasi, dan *library research*.

4. Pembahasan

Dari hasil regresi, rata-rata sebelum pemekaran lebih tinggi dibandingkan dengan setelah pemekaran yaitu sebelum pemekaran 12.670,44 dengan 3536,66, dengan standar deviasi sebelum pemekaran yaitu 709.13211 dan setelah pemekaran 433.28903. Untuk rata-rata standar error sebelum pemekaran yaitu 450.65532 sedangkan setelah pemekaran mempunyai rata-rata standar error yaitu 135.67702. Sedangkan dari hasil regresi uji beda t-test terlihat nilai signifikan (2-tailed) pada kolom Equal Variances Assumed sebesar 0,000 artinya nilai signifikan lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0.05). Sehingga ada perbedaan jumlah tenaga kerja secara signifikan sebelum 2002-2007 di Tapanuli Selatan dengan setelah pemekaran Padang Lawas 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Selain itu, jumlah industri besar dan sedang sebelum pemekaran memiliki rata-rata 55.1778 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata setelah pemekaran 37.5910. Dengan standar deviasi sebelum pemekaran yaitu 5.61727 dan setelah pemekaran sebesar 12.89110. Rata-rata standar error sebelum pemekaran yaitu 2.95647 dan setelah pemekaran 5.34011. Untuk nilai signifikannya (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed sebesar 0.000 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan antara jumlah industri besar dan sedang sebelum pemekaran tahun 2002-2007 dengan setelah pemekaran 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Terlihat juga jumlah perbandingan jumlah pusat kesehatan sebelum dan setelah pemekaran maka, jumlah tahun yang diuji adalah sebelum pemekaran dan setelah pemekaran yaitu 6 tahun. Perbedaan rata-rata sebelum pemekaran 1465.6670 lebih tinggi dibandingkan dengan setelah pemekaran 466.6667. Untuk standart deviasi sebelum pemekaran sebanyak 399.43580 dan setelah pemekaran 75.34485. Untuk rata-rata standar error yaitu sebelum pemekaran 161.53446 dan setelah pemekaran sebesar 30.95290. Sedangkan untuk nilai signifikannya yaitu nilai signifikan (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed yaitu 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan banyaknya jumlah pusat kesehatan sebelum pemekaran 2002-2007 dengan setelah pemekaran tahun 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Maka, sebelum pemekaran 2076.89212 lebih tinggi dibandingkan dengan setelah pemekaran yaitu dengan rata-rata 886.66502. Sedangkan untuk standar deviasi sebelum pemekaran yaitu sebesar 193.201821 dan setelah pemekaran yaitu 662.466988. Untuk rata-rata standar error sebelum pemekaran yaitu 77.934502 dan

setelah pemekaran yaitu 240.656582. Sedangkan untuk nilai signifikan (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed sebesar 0.001 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan jumlah panjang menurut kondisi di Tapanuli Selatan 2002-2007 dengan setelah pemekaran 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

5. Kesimpulan

Dari hasil analisis deskriptif untuk PDRB disimpulkan bahwa nilai signifikan (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed terlihat sebesar 0.005 lebih kecil dengan t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku di Tapanuli Selatan tahun 2002-2007 dengan setelah pemekaran di Padang Lawas tahun 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil analisis deskriptif untuk tenaga kerja disimpulkan bahwa nilai signifikan (2-tailed) pada kolom Equal Variances Assumed sebesar 0,000 artinya nilai signifikan lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0.05). Sehingga ada perbedaan jumlah tenaga kerja secara signifikan sebelum 2002-2007 di Tapanuli Selatan dengan setelah pemekaran di Padang Lawas 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil analisis deskriptif untuk industri besar dan sedang disimpulkan bahwa nilai signifikannya (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed sebesar 0.000 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan antara jumlah industri besar dan sedang sebelum pemekaran tahun 2002-2007 dengan setelah pemekaran 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil analisis deskriptif untuk jumlah pusat kesehatan disimpulkan bahwa nilai signifikannya yaitu nilai signifikan (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed yaitu 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan banyaknya jumlah pusat kesehatan sebelum pemekaran 2002-2007 dengan setelah pemekaran tahun 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil analisis deskriptif untuk jumlah sekolah disimpulkan bahwa nilai signifikannya (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed yaitu 0,000 lebih kecil dari pada t-tabel (0,05) artinya ada perbedaan jumlah sekolah negeri dan swasta tingkat SD, SMP, SMA/ sederajat secara signifikan antara sebelum pemekaran di Tapanuli Selatan 2002-2007 dengan setelah pemekaran di Padang Lawas tahun 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil analisis deskriptif untuk panjang jalan disimpulkan bahwa nilai signifikan (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed sebesar 0.001 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan jumlah panjang menurut kondisi di Tapanuli Selatan 2002-2007 dengan setelah pemekaran 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil analisis deskriptif untuk daya terpasang listrik disimpulkan bahwa nilai signifikan (2 tailed) pada kolom Equal Variances Assumed sebesar 0,063 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel (0,05). Artinya ada perbedaan secara signifikan jumlah daya terpasang listrik sebelum pemekaran tahun 2002-2007 dengan setelah pemekaran tahun 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil uji beda t-test dengan menggunakan SPSS 22for windows dari aspek ekonomi (pendapatan, tenaga kerja dan pertumbuhan industri besar dan sedang), sosial (banyaknya sekolah dan jumlah pusat kesehatan), infrastruktur (panjang jalan dan daya terpasang listrik) bahwa ada perbedaan secara signifikan antara sebelum pemekaran tahun 2002-2007 dengan setelah pemekaran tahun 2008-2013 dengan tingkat kepercayaan 95%.

Referensi

- [1] Lembaga Administrasi Negara. Executive Summary Kajian Evaluasi Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Daerah. <http://www.lan.go.id/kajian/ABSTRAK Kajian Evaluasi Pemekaran Daerah.pdf>. 3 April 2013.
- [2] Kementerian Dalam Negeri. 2013. Daerah Otonom Baru di Indonesia Per Provinsi Tahun 1999-2013. http://otda.kemendagri.go.id/images/file/new_data/dob_provinsi.pdf. 3 April 2013.
- [3] J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta: Asdi Mahasatya.

- [4] Ratnawati, K. Empirical Study of Effects of Local Financial Structure on Regional Economic Growth (Studies Conducted in Regencies in The Province of East Java, Indonesia).
- [5] W.J.S Poerwadarminta. 2005. Kamus besar Bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerahUU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- [6] Pamudji. 2000. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Tarigan, Antonius. 2010. Dampak Pemekaran Wilayah dalam: Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 01: 22-26. Jakarta.